

Analisis Pendapatan Daerah dalam Mengukur Kemandirian Daerah Kabupaten Bandung

Afiqah Fatma¹, Slamet Usman Ismanto²

^{1,2}Program Studi Administrasi Keuangan Publik, Universitas Padjadjaran

afiqah20001@mail.unpad.ac.id¹, slamet.ismanto@unpad.ac.id²

ABSTRACT

A region's ability to manage regional finances will influence the level of regional independence. To measure the regional independence of Bandung Regency, regional income was measured using ratio analysis consisting of the degree of decentralization ratio, the regional dependency ratio, the regional financial independence ratio, and the PAD effectiveness ratio. The method used in this research is a descriptive qualitative method using secondary data in the form of budget realization reports. The results of the research show that the regional financial performance of Bandung Regency has not been maximized with an average degree of decentralization of 18.41% with the criteria of insufficient capacity, the level of regional dependency is very high with an average of 68.45%, the average level of regional financial independence is 26.93% are included in low financial capability and have a consultative relationship pattern, the average PAD effectiveness level is 110.76% or is included in the very effective category. From the research results it can be concluded that Bandung Regency is not yet independent in managing its regional finances. Efforts that the Bandung Regency Regional Government can make to overcome this are by conducting outreach regarding tax regulations to taxpayers, exploring other potential sources of PAD revenue, and intensifying PAD revenue.

Keywords : Financial Performance, Ratio Analysis, Financial Independence.

ABSTRAK

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah akan mempengaruhi tingkat kemandirian daerah tersebut. Untuk mengukur kemandirian daerah Kabupaten Bandung maka dilakukan pengukuran terhadap pendapatan daerah menggunakan analisis rasio yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio tingkat ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bandung belum maksimal dengan rata-rata derajat desentralisasi sebesar 18,41% dengan kriteria kemampuan kurang, tingkat ketergantungan daerah sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 68,45%, rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 26,93% yang termasuk dalam kemampuan keuangan rendah dan memiliki pola hubungan konsultatif, rata-rata tingkat efektivitas PAD sebesar 110,76% atau termasuk dalam kategori sangat efektif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung belum mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai regulasi perpajakan kepada wajib pajak, menggali potensi sumber penerimaan PAD lain, dan melakukan intensifikasi penerimaan PAD.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Analisis Rasio, Kemandirian Daerah.

PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat membawa perubahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah merupakan bentuk penyerahan kewenangan daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaannya dengan perangkat daerah sebagai pelaksananya.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat. Besarnya kewenangan yang diberikan menuntut pemerintah daerah untuk dapat lebih mandiri dengan menggali potensi yang ada di daerahnya untuk membiayai kebutuhannya tanpa mengurangi kemungkinan penerimaan bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut (Mahmudi, 2019), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan baik tidaknya kinerja keuangan suatu daerah. Karena itu, di setiap pemerintah daerah termasuk pemerintah Kabupaten Bandung harus dapat mengelola keuangan daerah dengan baik sesuai dengan pemberlakuan otonomi daerah. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2018-2021 pada Tabel 1 dibawah ini disajikan data rincian perolehan PAD, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung (diolah, 2024).

No .	Jenis Pendapatan	2018	2019	2020	2021
1.	PAD	927.543.321. 132,26	1.025.354.25 2.357,57	1.019.355.74 1.053,99	1.095.969.8 43.558,02
2.	Pendapatan Transfer	3.666.263.71 0.871,00	3.996.968.98 5.843,00	3.574.982.66 1.411,00	3.881.631.3 15.771,00
3.	Lain-lain Pendapatan yang sah	666.167.779. 366,00	707.861.860. 902,00	751.654.370. 862,00	775.267.865 .454,00
	Jumlah/Total	5.259.974.81 1.369,26	5.730.185.09 9.102,57	5.345.992.77 3.326,99	5.752.869.0 24.783,02

Pada tahun 2019, pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung mengalami kenaikan sebesar 10,55%, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -0,59%. Pada tahun 2021, pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung mengalami kenaikan menjadi sebesar 7,52%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kontribusi pendapatan asli daerah berpengaruh pada total pendapatan daerah Kabupaten Bandung.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat membuktikan kemandirian pemerintah daerah dalam mengarahkan penerimaan PAD sesuai dengan target dan

tingkat efisiensi keuangan daerah (Mahmudi, 2019). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Kontribusi PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung (diolah, 2024).

No.	Tahun	TPD	PAD	Kontribusi
1.	2018	5.259.974.811.369,26	927.543.321.132,26	17,63%
2.	2019	5.730.185.099.102,57	1.025.354.252.357,57	17,89%
3.	2020	5.345.992.773.326,99	1.019.355.741.053,99	19.07%
4.	2021	5.752.869.024.783,02	1.095.969.843.558,02	19,05%

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, pendapatan total daerah Kabupaten Bandung sebagian besar masih dibantu oleh pendapatan transfer. Secara keseluruhan total pendapatan daerah dan pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami kenaikan, hanya pada tahun 2020 saja yang mengalami penurunan. Tetapi dilihat dari tingkat kontribusi PAD terhadap TPD Kabupaten Bandung masih tergolong rendah, karena tingkat kontribusi masih dibawah 50%. Total pendapatan daerah Kabupaten Bandung masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pusat atau provinsi. Untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan daerah dengan melakukan perhitungan rasio derajat desentralisasi, rasio tingkat ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Analisis Pendapatan Daerah dalam Mengukur Kemandirian Daerah Kabupaten Bandung”.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan daerah telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Rusnani Rahmadani & Ahmad Rudini yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021 (Rahmadani, R. & Rudini, A., 2023), kinerja keuangan menunjukkan hasil yang cukup efektif dengan pola hubungan instruktif. Penelitian Anike Deswira dengan judul Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Deswira, A, 2022), kinerja keuangan termasuk dalam kategori kurang efektif dan belum ada keserasian dalam belanja. Penelitian Nurul Sukma Handayani yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Kalimantan Timur (Handayani. NS, 2019), kinerja keuangan kurang efisien dan memiliki tingkat kemandirian yang rendah.

Penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori kinerja keuangan daerah dari Mahmudi (2019) yaitu dengan melakukan analisis rasio pada sisi pendapatan daerah yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio tingkat ketergantungan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021 yang bertujuan untuk

mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bandung dengan menganalisis pendapatan daerah Kabupaten Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) Pengukuran kinerja keuangan merupakan bagian dari fungsi pengendalian manajemen karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk mengendalikan aktivitas. Kinerja keuangan daerah merupakan besar capaian dari target kegiatan keuangan yang telah ditetapkan pemerintah daerah yang dinilai menggunakan indikator-indikator keuangan dari laporan hasil pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan daerah dapat menjadi suatu aspek penting bagi daerah karena dapat memberikan umpan balik atas kegiatan yang telah berjalan selama satu periode dan dapat menjadi sebuah bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangannya (Sijabat, 2014).

Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah dimana pemerintah pusat menyerahkan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah akan menjalankan kewenangan daerahnya sendiri seperti melakukan belanja daerah, memungut pajak daerah, dan menerima bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer. Menurut Sidik (2002), desentralisasi fiskal adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan negara dengan memberikan pelayanan publik yang baik dan pengambilan keputusan yang lebih demokratis. Desentralisasi fiskal merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah dibawahnya untuk melakukan belanja daerah, hak untuk memungut pajak daerah, membentuk dewan yang dipilih rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD dan mendapatkan bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

Analisis Laporan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019) analisis laporan keuangan berarti memetakan laporan keuangan menjadi informasi yang lebih sederhana untuk dapat membantu dalam memahami laporan keuangan, mengartikan nominal angka dalam laporan keuangan, menilai laporan keuangan, sehingga dari laporan keuangan tersebut dapat diambil sebuah keputusan. Untuk membuat analisis laporan keuangan ada beberapa teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan, teknik yang paling sering digunakan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis dengan membandingkan antara dua komponen nilai yang terdapat pada laporan keuangan daerah untuk mengetahui kinerja organisasi dalam periode tertentu atau membandingkan kinerja dengan organisasi sejenis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bandung tahun 2018-2021 yang diperoleh dari kantor BKAD Kabupaten Bandung. Objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dengan subjek berupa laporan keuangan daerah Kabupaten Bandung tahun 2018-2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi dokumentasi. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3 Kriteria Derajat Desentralisasi

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996 (dalam Maulina & Rhea, 2019).

No	Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Kriteria Derajat Desentralisasi
1	0-10%	Sangat Kurang
2	10,01-20%	Kurang
3	20,01-30%	Sedang
4	30,01-40%	Cukup
5	40,01-50%	Baik
6	>50%	Sangat Baik

b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4 Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 (dalam Wahab, 2017).

No	Tingkat Persentase PAD terhadap Total Pendapatan	Tingkat Ketergantungan
1	0-10%	Sangat Rendah
2	10,01-20%	Rendah
3	20,01-30%	Sedang
4	30,01-40%	Cukup
5	40,01-50%	Tinggi
6	>50%	Sangat Tinggi

c. Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat+provinsi+pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 5 Kemampuan Keuangan dan Pola Hubungan Kemandirian Daerah

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996 (dalam Maulina & Rhea, 2019).

No	Tingkat Persentase	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
1	0-25%	Rendah Sekali	Instruktif
2	25-50%	Rendah	Konsultatif
3	50-75%	Sedang	Partisipatif
4	75-100%	Tinggi	Delegatif

d. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6 Tingkat Efektivitas PAD

Sumber: Mahmudi, 2019.

No	Tingkat Efektivitas PAD	Skala Penilaian (%)
1	Sangat Efektif	>100%
2	Efektif	100%
3	Cukup Efektif	90-99%
4	Kurang Efektif	75-89%
5	Tidak Efektif	<75%

HASIL DAN PEMBAHASAN

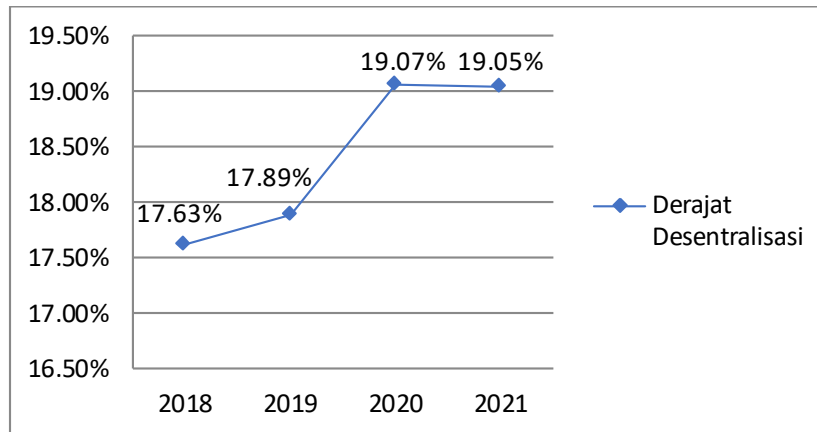
Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Hasil dari perhitungan rasio ini adalah besarnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019). Berikut hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi.

Tabel 7 Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung (diolah, 2024).

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi TPD	Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria
2018	927.543.321.132	5.259.974.811.369	17,63%	Kurang
2019	1.025.354.252.357	5.730.185.099.102	17,89%	Kurang
2020	1.019.355.741.053	5.345.992.773.326	19,07%	Kurang
2021	1.095.969.843.558	5.752.869.024.783	19,05%	Kurang
Rata-rata			18,41%	Kurang



Gambar 1 Grafik Derajat Desentralisasi

Gambar 1 menunjukkan bahwa derajat desentralisasi tahun 2020 dan 2021 lebih tinggi dari tahun 2018 dan 2019. Semakin tinggi hasil derajat desentralisasi menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap total pendapatan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi Kabupaten Bandung. Meskipun mengalami kenaikan, derajat desentralisasi Kabupaten Bandung masih tergolong dalam kriteria “kurang”, atau bisa disebut bahwa kontribusi PAD masih belum optimal terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bandung.

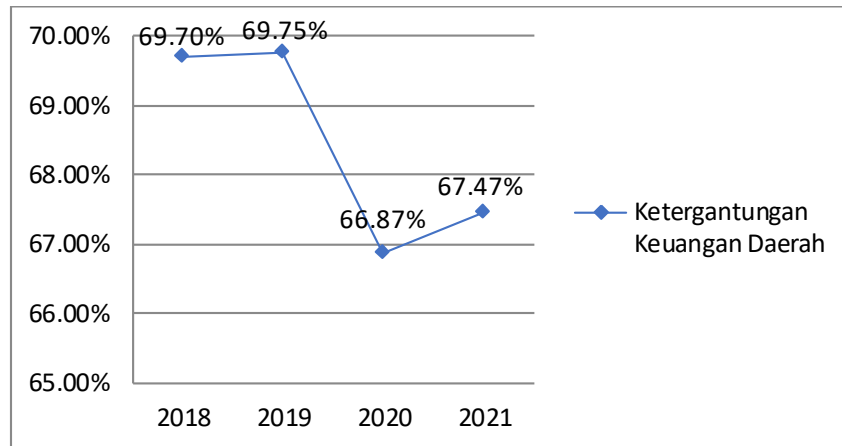
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pendapatan transfer yang diterima suatu daerah terhadap total pendapatan daerah (Mahmudi, 2019). Berikut hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah.

Tabel 8 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung (diolah, 2024).

Tahun	Realisasi Dana Transfer	Realisasi Total Pendapatan Daerah	Tingkat Ketergantungan (%)	Tingkat Ketergantungan
2018	3.666.263.710.871	5.259.974.811.369	69,70%	Sangat Tinggi
2019	3.996.968.985.843	5.730.185.099.102	69,75%	Sangat Tinggi
2020	3.574.982.661.411	5.345.992.773.326	66,87%	Sangat Tinggi
2021	3.881.631.315.771	5.752.869.024.783	67,47%	Sangat Tinggi
Rata-rata			68,45%	Sangat Tinggi



Gambar 2 Grafik Ketergantungan Keuangan Daerah

Dengan rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Bandung tahun 2018-2021 yang lebih dari 50% yaitu sebesar 68,45% menjadikan Kabupaten Bandung menjadi daerah yang memiliki tingkat ketergantungan “sangat tinggi” terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga sesuai kriteria kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung masih belum optimal dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer.

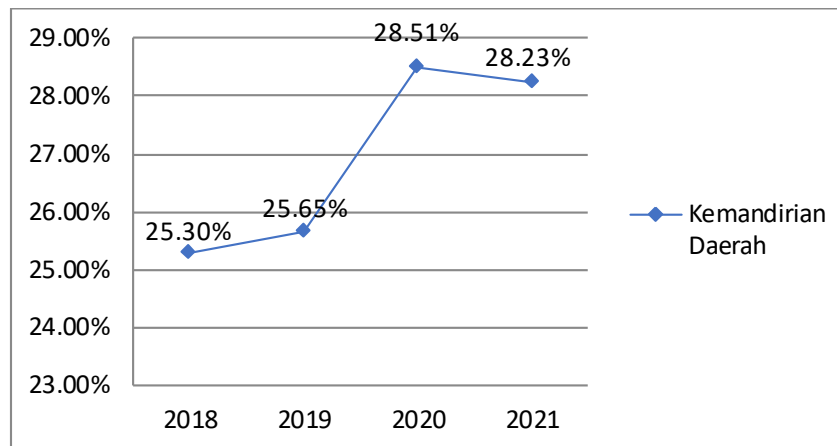
Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan berdasar pada perbandingan jumlah pendapatan asli daerah terhadap jumlah pendapatan transfer baik itu dari pusat dan provinsi serta pinjaman yang diterima daerah (Mahmudi, 2019). Berikut hasil perhitungan rasio kemandirian daerah.

Tabel 9 Rasio Kemandirian Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung (diolah, 2024).

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Dana Transfer	Persentase	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2018	927.543.321.132	3.666.263.710.871	25,30%	Rendah	Konsultatif
2019	1.025.354.252.357	3.996.968.985.843	25,65%	Rendah	Konsultatif
2020	1.019.355.741.053	3.574.982.661.411	28,51%	Rendah	Konsultatif
2021	1.095.969.843.558	3.881.631.315.771	28,23%	Rendah	Konsultatif
Rata-rata			26,93%	Rendah	Konsultatif



Gambar 3 Grafik Kemandirian Daerah

Tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bandung tahun 2018-2021 memiliki rata-rata sebesar 26,93%, sehingga kemampuan keuangan Kabupaten Bandung tergolong “rendah”. Dengan kemampuan keuangan yang dimiliki, pola hubungan Kabupaten Bandung dengan pemerintah pusat adalah konsultatif, Kabupaten Bandung dinilai sedikit mampu dalam melaksanakan otonomi daerah sehingga peran pemerintah pusat sedikit berkurang. Dalam meningkatkan kemandirian daerah, kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung masih belum optimal.

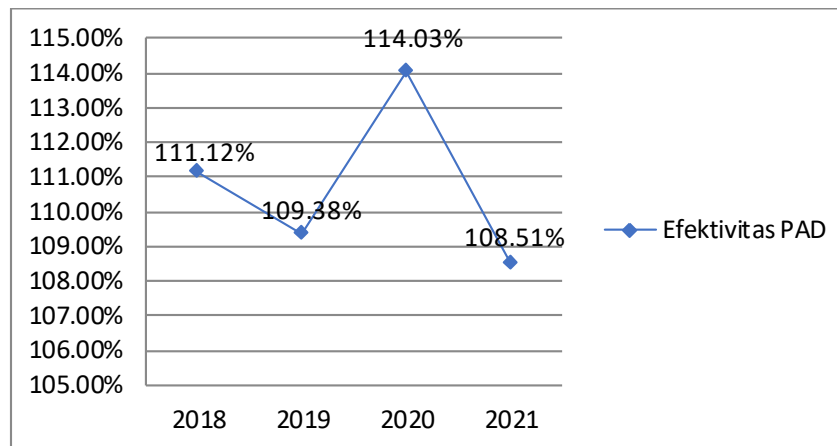
Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan berdasar pada perbandingan realiasi pendapatan asli daerah terhadap harapan atau target diterimanya pendapatan asli daerah (Mahmudi, 2019). Berikut hasil perhitungan rasio efektivitas PAD.

Tabel 10 Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bandung Tahun 2018-2021

Sumber: BKAD Kabupaten Bandung (diolah, 2024).

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Skala Penilaian (%)	Tingkat Efektivitas
2018	927.543.321.132	834.706.298.691	111,12%	Sangat Efektif
2019	1.025.354.252.357	937.419.374.522	109,38%	Sangat Efektif
2020	1.019.355.741.053	893.967.336.241	114,03%	Sangat Efektif
2021	1.095.969.843.558	1.010.043.609.147	108,51%	Sangat Efektif
Rata-rata			110,76%	Sangat Efektif



Gambar 4 Grafik Efektivitas PAD

Skala penilaian efektivitas PAD Kabupaten Bandung tahun 2018-2021 melebihi 100% yang menjadikan tingkat efektivitas PAD Kabupaten Bandung tergolong dalam tingkat “sangat efektif”. Realisasi PAD yang melebihi target PAD menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bandung telah berhasil dalam mengatur penerimaan PAD dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditentukan sehingga kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam memaksimalkan realisasi PAD dari sumber potensi penerimaan PAD telah maksimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diketahui kinerja keuangan Kabupaten Bandung tahun 2018-2021, rata-rata rasio derajat desentralisasi sebesar 18,41% yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kurang memberikan kontribusi yang besar terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Bandung. Rasio ketergantungan keuangan daerah memiliki rata-rata 68,45% dimana Kabupaten Bandung memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat dan provinsi. Rasio kemandirian daerah menunjukkan rata-rata sebesar 26,93% sehingga kemampuan keuangan Kabupaten Bandung adalah rendah dengan pola hubungan konsultatif. Rasio efektivitas PAD memiliki rata-rata 110,76% yang berarti Kabupaten Bandung sangat efektif dalam mengatur penerimaan PAD.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung belum mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini disebabkan karena perolehan pendapatan daerah yang masih didominasi oleh dana transfer pusat dan provinsi serta kesadaran wajib pajak yang rendah dalam melaksanakan pembayaran pajak. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung diantaranya adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai regulasi perpajakan kepada wajib pajak melalui OPD terkait, menggali potensi-potensi sumber penerimaan PAD lain, dan melakukan intensifikasi penerimaan PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Deswira, Anike. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi dan Manajemen*, 17(1), 72-88.
- Fahriza, M. & Riswati. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah Untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 10(2), 158-172.
- Handayani, N.S. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Kalimantan Timur. *JIAM: Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 4(1), 1-12.
- Indonesia. (2014). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marliani, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, 14(1), 11-20.
- Maulina, F., & Rhea. (2019). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat). *Obis*, 2(1), 11-22.
- Rahmadani, R. & Rudini, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018-2021. *E-Jurnal Profit (Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan)*, 8(2), 133-143.
- Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). *Makalah Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*, 1-23.
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Administrasi Publik*, 2(2), 236-242.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, L. O. A., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(3), 1-17.